



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/03/2025
 Reviewed : 02/04/2025
 Accepted : 04/04/2025
 Published : 07/04/2025

Irma Siagian¹
 Dilli Salsa Fira²
 Dwi Susanti³
 Febriana Krisdayanti
 Barus⁴
 Khairiah⁵

REGULASI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN

Abstrak

Regulasi lembaga keuangan memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi lembaga keuangan di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, inklusi keuangan, serta pencegahan kejahatan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, serta laporan dari lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan seperti persyaratan modal minimum dan stress test pada perbankan. Namun, tantangan masih ditemukan dalam sektor keuangan non-bank, khususnya terkait kasus gagal bayar dan penipuan investasi.

Keyword: Regulasi, Kebijakan. Lembaga Keuangan, OJK, BI

Abstract

Financial institution regulations play a significant role in maintaining financial system stability and protecting public interests. This study analyzes the effectiveness of financial institution regulations in Indonesia by considering various indicators, such as financial system stability, consumer protection, financial inclusion, and the prevention of financial crimes. This research employs a qualitative approach using the library research method. The primary data sources include relevant literature, such as academic journals, books, government regulations, and reports from financial institutions like Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). The analysis results indicate that regulations implemented by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) have contributed to financial system stability through policies such as minimum capital requirements and stress tests in the banking sector. However, challenges remain in the non-bank financial sector, particularly concerning cases of default and investment fraud.

Keywords: Regulation, Policy, Financial Institutions, Ojk, Bi.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan menjalankan peran yang vital dalam struktur ekonomi suatu bangsa. Sebagai penyedia jasa moneter, badan ini berfungsi sebagai perantara antara kelompok dengan kelebihan modal dan pihak yang memerlukan pembiayaan. Dengan adanya organisasi ini, alokasi anggaran dalam perekonomian dapat berlangsung lebih optimal, sehingga mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan (Puspa, 2024).

Selain itu, lembaga keuangan juga memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, lembaga keuangan membantu mempercepat arus investasi,

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan
 email: irmasiagian@unimed.ac.id, dllisalsafr@gmail.com, dwi811315@gmail.com,
 fbrianakrsbarus@gmail.com, khairiah66@gmail.com

mendukung pertumbuhan usaha, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko finansial. Namun, untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan tersebut berjalan dengan transparan, aman, dan stabil, diperlukan regulasi dan kebijakan yang mengatur operasional lembaga keuangan secara ketat (Ismamudi et al., 2023).

Regulasi lembaga keuangan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mengurangi risiko sistemik, serta mencegah berbagai praktik yang dapat merugikan stabilitas ekonomi, seperti fraud, pencucian uang, manipulasi pasar, dan kebangkrutan sistemik. Tanpa regulasi yang memadai, sistem keuangan dapat menjadi rentan terhadap berbagai ancaman yang berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan, seperti bank sentral dan lembaga pengawas keuangan, memiliki tanggung jawab dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor keuangan dan stabilitas ekonomi (Anggraeni et al., 2023).

Di Indonesia, regulasi lembaga keuangan diatur melalui berbagai perundang-undangan dan diawasi oleh sejumlah lembaga yang berwenang, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Keuangan. Masing-masing lembaga keuangan, baik yang berbasis perbankan maupun non-perbankan, memiliki regulasi tersendiri yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat risikonya. Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem pembayaran, sementara OJK memiliki kewenangan dalam pengawasan industri perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Selain itu, Kementerian Keuangan berperan dalam menyusun kebijakan fiskal yang berhubungan dengan sektor keuangan (Kurniawan, 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, regulasi lembaga keuangan juga mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru, seperti digitalisasi keuangan, fintech, dan risiko siber. Munculnya layanan keuangan berbasis teknologi, seperti e-wallet, peer-to-peer lending, dan cryptocurrency, menuntut adanya regulasi yang adaptif agar inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Melalui artikel ini, akan dibahas berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur lembaga keuangan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasinya serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Pemahaman terhadap regulasi keuangan menjadi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan, termasuk pelaku usaha, investor, akademisi, serta masyarakat umum. Dengan memahami regulasi yang ada, setiap pihak dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak serta turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

METODE

Riset ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber informasi utama diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan, seperti publikasi akademik, naskah, kebijakan pemerintah, serta dokumentasi dari badan finansial, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Pengawas Keuangan (OJK). Data yang dihimpun dikaji secara naratif guna menelaah perubahan kebijakan institusi finansial serta implikasinya terhadap kestabilan perekonomian nasional.

Selain itu, teknik pengolahan data yang diterapkan adalah telaah konten (content analysis) terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji studi kasus terkait penerapan regulasi dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank guna memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Oleh karena itu, temuan riset ini diantisipasi mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran regulasi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor keuangan dan stabilitas ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Lembaga Keuangan di Indonesia

Regulasi lembaga keuangan di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen. Dalam konteks global yang semakin kompleks, lembaga keuangan berperan sebagai pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Regulasi yang tepat dan efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi

dengan baik, memenuhi standar keamanan, dan memberikan layanan yang transparan kepada masyarakat.

Di Indonesia, regulasi lembaga keuangan mencakup berbagai institusi, termasuk bank, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) merupakan dua lembaga utama yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan. Melalui kebijakan dan regulasi yang ditetapkan, tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk mencegah risiko sistemik, melindungi nasabah, serta mendorong perkembangan sektor keuangan yang inklusif.

Undang – Undang Terkait Lembaga Keuangan

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur lembaga keuangan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa undang-undang penting yang terkait dengan lembaga keuangan:

- 1) UU No. 10 Tahun 1998: Regulasi ini menetapkan berbagai aspek operasional perbankan di Indonesia, mencakup pembentukan, aktivitas, dan pengawasannya. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat, stabil, dan kompetitif dalam menunjang ekonomi nasional. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, sektor perbankan diharapkan dapat berjalan secara transparan serta bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan.
- 2) UU No. 21 Tahun 2008: Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi sistem perbankan berbasis syariah di Indonesia. Aturan ini menetapkan ketentuan mengenai penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah, termasuk larangan praktik riba dan penerapan sistem bagi hasil. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan jaminan hukum bagi nasabah yang menggunakan layanan bank syariah, sehingga mendukung pertumbuhan industri keuangan Islami di Indonesia.
- 3) UU No. 8 Tahun 1995: Aturan ini mengatur berbagai kebijakan terkait sektor pasar modal, termasuk penerbitan instrumen keuangan, aktivitas perdagangan saham, serta sistem pengawasan pasar modal. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan pasar modal yang transparan, efektif, dan aman bagi para investor. Dalam pelaksanaannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mengontrol dan mengatur aktivitas di sektor ini guna melindungi kepentingan investor serta menjaga keseimbangan sistem keuangan.
- 4) UU No. 24 Tahun 2004: Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang berfungsi untuk melindungi simpanan nasabah di perbankan. Keberadaan LPS memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam menyimpan dana mereka di institusi keuangan. Selain itu, aturan ini juga mengatur mekanisme penjaminan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan guna memastikan stabilitas sektor perbankan dan mencegah risiko sistemik akibat kegagalan bank.
- 5) UU No. 1 Tahun 2013: Regulasi ini mengatur pendirian, pengelolaan, serta pengawasan lembaga keuangan mikro, dengan tujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan finansial, khususnya bagi usaha kecil serta komunitas di daerah terpencil. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, institusi keuangan mikro dapat beroperasi lebih terstruktur dan memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang menggunakan layanannya, sehingga mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Peraturan ini adalah elemen krusial dalam pengaturan institusi finansial di Indonesia, yang bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang seimbang, jelas, dan berkesinambungan.

Peran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1) Peran Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

- Stabilitas Moneter: Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab menjaga keseimbangan moneter di Indonesia. Untuk itu, BI menggunakan berbagai kebijakan, salah satunya adalah mengatur suku bunga dalam pasar keuangan. Stabilitas moneter penting karena ketidakseimbangannya dapat memengaruhi ekonomi. Jika kebijakan terlalu ketat, pertumbuhan ekonomi bisa melambat, sedangkan jika terlalu longgar, inflasi bisa naik. Oleh karena itu, BI menerapkan kerangka pengendalian inflasi agar kebijakan tetap seimbang.
 - Kinerja Lembaga Keuangan: Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga kesehatan sektor perbankan melalui pengawasan dan regulasi. Karena bank memegang peranan besar dalam sistem keuangan, kegagalan di sektor ini bisa menyebabkan krisis keuangan. Oleh sebab itu, BI menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi dan mencegah masalah sejak dini.
 - Sistem Pembayaran: BI memastikan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Jika terjadi gangguan dalam transaksi keuangan, dampaknya bisa meluas ke sektor lain. Untuk mencegah hal ini, BI menggunakan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) yang mempercepat dan mengamankan transaksi antarbank, sehingga risiko gagal bayar dapat dikurangi.
 - Pemantauan Stabilitas Keuangan: BI juga terus mengawasi kondisi keuangan nasional untuk mendeteksi potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Melalui pemantauan makroprudensial, BI menganalisis berbagai faktor yang dapat memicu krisis dan mengambil langkah-langkah pencegahan bersama pihak terkait.
 - Lender of Last Resort (LoLR): Sebagai bank sentral, BI juga bertindak sebagai penyedia dana darurat bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan, terutama saat krisis. Namun, pemberian dana ini tetap diawasi ketat agar tidak disalahgunakan dan menimbulkan risiko moral hazard dalam dunia perbankan.
- 2) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Salah satu tugas utama OJK adalah memantau seluruh kegiatan industri jasa keuangan, termasuk perbankan, perusahaan asuransi, dan pasar modal, untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia. OJK juga menerbitkan izin usaha untuk lembaga keuangan dan memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Dengan pengawasan ketat, OJK berupaya melindungi konsumen dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Sebagai tambahan, OJK menyusun kerangka utama dalam sistem moneter, mencakup ekosistem pertukaran daring, demi mengoptimalkan stabilitas serta pengamanan. Pada era digital, keamanan dan keyakinan dalam aktivitas pembayaran amatlah vital, sehingga LPK berkontribusi dalam menjamin hal tersebut, memungkinkan arus transaksi ekonomi berjalan secara sigap dan terpercaya (Makur & Astutik, 2023).

OJK juga melakukan langkah pencegahan terhadap kemungkinan krisis keuangan. Dengan pengawasan yang cermat dan evaluasi risiko, OJK bekerja sama dengan institusi lain, seperti Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Persaingan Usaha, guna mendeteksi serta menangani potensi ancaman sistemik.

Dapat disimpulkan bahwa peranan OJK dalam menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan di Indonesia sangatlah vital. Melalui pengendalian yang ketat terhadap sektor layanan keuangan, penguatan struktur keuangan, serta tindakan pencegahan dalam mengantisipasi potensi krisis, OJK berusaha menjamin kestabilan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, fungsi OJK perlu terus diperkuat agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan risiko di masa depan (Abadi, 2021).

Kebijakan Lembaga Keuangan

Regulasi moneter dan fiskal memiliki peran penting dalam mempengaruhi institusi keuangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas perbankan, seperti tingkat bunga dan aktivitas pasar terbuka, dapat berdampak pada kelancaran likuiditas serta biaya pendanaan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. Ketika suku bunga dinaikkan, biaya pinjaman akan meningkat, yang dapat mengurangi permintaan kredit dari masyarakat dan bisnis. Sebaliknya,

penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan aktivitas ekonomi.

Kebijakan Moneter

Regulasi moneter merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan oleh otoritas perbankan suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang tersirkulasi agar tetap terjaga. Tujuan utama kebijakan ini adalah memelihara kestabilan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjamin keamanan sistem keuangan.

Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan, yaitu meliputi:

1. Menaikkan/menurunkan Suku
Jika ingin menstimulasi perkembangan ekonomi, lembaga perbankan menurunkan tingkat bunga untuk mendorong investasi & konsumsi. Jika ingin mengendalikan inflasi, bank akan menaikkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit.
2. Menambah/mengurangi Cadangan Bank (misal menjual/membeli SBN)
Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dengan membeli atau menjual surat berharga negara atau mata uang asing. Dengan meningkatkan atau mengurangi simpanan perbankan, mereka dapat mengatur jumlah uang dalam perekonomian.
3. Menentukan Rasio Cadangan Wajib bank komersial (GWM: Giro Wajib Minimum)
Otoritas moneter memiliki wewenang untuk menetapkan persentase simpanan wajib yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan. Dengan menyesuaikan proporsi cadangan yang harus ditahan, bank pusat dapat mengendalikan jumlah dana yang dapat disalurkan sebagai kredit oleh bank komersial.

Kebijakan Fiskal

Regulasi fiskal merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Sama seperti individu yang berusaha menghindari kerugian finansial di akhir bulan, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan anggaran. Tujuan utama strategi fiskal adalah mewujudkan stabilitas antara penerimaan dan belanja publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi tantangan seperti kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Terdapat berbagai jenis kebijakan fiskal, seperti seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Namun, beberapa alat yang sering digunakan dalam regulasi fiskal mencakup:

1. Mengelola Pengeluaran Negara untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi melalui pengaturan belanja negara. Dengan menambah anggaran pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, otoritas dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Memberikan Bantuan untuk Sektor Tertentu
Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan otoritas untuk mendukung bidang-bidang tertentu agar dapat berkembang lebih cepat. Misalnya, industri pertanian sering menerima dukungan dalam bentuk harga pupuk yang terjangkau atau bantuan alat-alat produksi guna meningkatkan hasil panen.
3. Menerapkan Regulasi Perpajakan
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan. Otoritas dapat menyesuaikan strategi pajak sesuai dengan situasi ekonomi yang sedang berlangsung.
4. Menjalankan Kebijakan Pinjaman
Untuk membiayai program-program pembangunan dan menutup kekurangan anggaran, otoritas dapat mengambil langkah utang. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan menerbitkan surat utang yang dapat dibeli oleh investor domestik maupun internasional.

Dampak Regulasi Terhadap Lembaga Keuangan

Dampak regulasi terhadap lembaga keuangan sangat signifikan dan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk kinerja, stabilitas, dan perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa dampak utama dari regulasi terhadap lembaga keuangan:

- 1) Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan: Regulasi yang ketat dapat mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya standar yang

jelas mengenai pengelolaan risiko, transparansi, dan akuntabilitas, lembaga keuangan diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. Situasi ini juga dapat memperkuat keyakinan publik terhadap institusi finansial tersebut.

- 2) Stabilitas Sistem Keuangan: Regulasi berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, lembaga keuangan diharapkan dapat mengelola risiko dengan lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan lembaga yang dapat berdampak sistemik. Misalnya, regulasi mengenai kecukupan modal (CAR) membantu memastikan bahwa bank memiliki buffer yang cukup untuk menahan kerugian.
- 3) Perlindungan Konsumen: Regulasi juga berperan penting dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan adanya ketentuan yang mengatur transparansi informasi dan perlindungan data, konsumen dapat merasa lebih aman dalam menggunakan layanan keuangan. Aspek ini krusial untuk memperluas pemahaman finansial serta memperkuat keyakinan publik terhadap institusi keuangan.
- 4) Inovasi dan Adaptasi: Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dalam sektor keuangan, terutama di bidang fintech. Lembaga keuangan mungkin merasa tertekan untuk mematuhi berbagai regulasi yang ada, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Maka dari itu, esensial untuk mencapai harmoni antara pengawasan yang ketat dan keleluasaan dalam berinovasi.
- 5) Kepatuhan dan Biaya Operasional: Regulasi yang kompleks dapat meningkatkan biaya operasional lembaga keuangan. Biaya untuk mematuhi regulasi, seperti pelaporan dan audit, dapat menjadi beban tambahan bagi lembaga keuangan, terutama bagi lembaga yang lebih kecil. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing mereka di pasar.

Analisis Efektivitas Regulasi Lembaga Keuangan di Indonesia

Lembaga keuangan memiliki peran yang krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi yang mengatur operasional lembaga keuangan. Namun, efektivitas regulasi ini masih menjadi perdebatan mengingat tantangan yang dihadapi sektor keuangan, seperti risiko kredit, likuiditas, dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas regulasi lembaga keuangan di Indonesia meliputi:

1. Peraturan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkontribusi terhadap ketahanan sistem perbankan. Adanya uji ketahanan serta persyaratan modal minimum bagi lembaga keuangan telah mengurangi potensi kebangkrutan. Namun, beberapa kasus gagal bayar di sektor keuangan non-perbankan menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pengawasan.
2. OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keamanan nasabah, termasuk aturan tentang kejelasan produk finansial. Namun, masih banyak insiden penipuan investasi yang menunjukkan bahwa pemahaman serta penegakan hukum perlu diperkuat.
3. Regulasi telah mendorong perluasan akses keuangan melalui program layanan finansial berbasis digital, seperti Laku Pandai dan pembiayaan fintech. Meski demikian, tantangan dalam pengawasan teknologi finansial yang berkembang pesat menjadi permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
4. Aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT) telah diimplementasikan dengan ketat. Namun, efektivitas penerapan masih menghadapi hambatan, terutama dalam memantau transaksi digital yang semakin rumit.

Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Keuangan

Beberapa tantangan dalam penerapan kebijakan keuangan di Indonesia meliputi:

1. Kurangnya harmonisasi regulasi antar Lembaga, Dibutuhkan koordinasi lebih erat antara OJK, BI, dan Kementerian Keuangan.
2. Pengawasan terhadap fintech, Regulasi harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan.

3. Peningkatan literasi keuangan, Perlu lebih banyak edukasi kepada masyarakat untuk menghindari jebakan investasi ilegal.
 4. Penegakan hukum yang lebih tegas, Sanksi terhadap pelanggaran regulasi harus lebih kuat untuk memberikan efek jera.
 5. Volatilitas Ekonomi Global, Ketidakpastian ekonomi dunia dapat mempengaruhi kebijakan keuangan domestik, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel.
- Adaptasi terhadap Teknologi Baru, Perkembangan teknologi seperti blockchain dan mata uang digital menuntut perubahan dalam regulasi yang lebih responsif.

SIMPULAN

Regulasi lembaga keuangan di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan inklusi keuangan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar regulasi menjadi lebih efektif. Reformasi regulasi yang lebih adaptif dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga pengawas menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas regulasi lembaga keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E. A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 135-144.
- Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35-44.
- Kurniawan. (2021). Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi). Penerbit Adab.
- Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, G. N. INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL. Jambi: Sonpedia Indonesia
- Puspa, R. (2024). Mengenal Lembaga Keuangan di Indonesia: Peran dan Dampaknya pada Ekonomi. Bandung: Eureka
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1-13.